

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengharuskan setiap instansi pemerintah melaporkan hasil kinerja atau keberhasilan yang telah dicapai atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang dimuat dalam laporan ini adalah tingkat pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2017.

Dalam Laporan Kinerja ini juga diuraikan realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2017 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja pada tahun sebelumnya. Hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang sudah memuaskan, untuk itu kinerja ini harus tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan di masa yang akan datang.

Semoga Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2017, selain menjadi media pertanggungjawaban atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, juga dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi kinerja organisasi, dan menjadi bahan pembelajaran yang baik bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang agar pelaksanaan kinerja ke depan berjalan lebih produktif, efektif dan efisien.

Padang Panjang, Januari 2018

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Padang Panjang**



**MARWILIS, SH, M.Si**  
**NIP. 19610703 198203 1 008**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah diharuskan untuk melaporkan hasil kinerja atau keberhasilan yang telah dicapai atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Untuk itu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2017.

Evaluasi atas capaian kinerja yang dimuat dalam laporan ini adalah tingkat pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2017, yang berguna sebagai tolok ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat di bidang komunikasi dan informatika.

### **B. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dimaksudkan:

1. Sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban, dan sekaligus sebagai media peningkatan kinerja.
2. Untuk lebih mengetahui hasil kinerja Dinas, Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang periode tahun 2017
3. Agar sumber-sumber anggaran yang dialokasikan penggunaannya dapat lebih efektif dan efisien pemakaiannya.
4. Sebagai dasar penilaian kinerja dan pedoman dalam meningkatkan kinerja.

Dinas, Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang melalui program dan kegiatan yang tepat sasaran. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP) ini bertujuan :

1. Sebagai indikator dalam melihat keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.
2. Dapat menjadi acuan dalam menyusun Lakip Pemerintah Kota Padang Panjang dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Panjang.
3. Sebagai program strategis dalam pengembangan sumber daya manusia.

## C. Penjelasan Umum Organisasi

### C.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Dalam rangka melaksanakan kewenangan dibidang Komunikasi dan Informatika, maka berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016, ditetapkanlah tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, .

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang adalah sebagai salah satu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kota Padang Panjang, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang mempunyai susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang E-Government dan Teknologi Informasi;
4. Bidang Informasi Komunikasi Publik;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan Persandian serta tugas pembantuan yang diberikan.
2. **Sekretariat**, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian
- b. Pengelolaan program administrasi keuangan
- c. Pengelolaan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- d. Pelaksanaan urusan Hukum, Organisasi dan Tata Laksana serta Kehumasan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sekretariat terdiri dari :

- a. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, kehumasan, menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pendidikan dan latihan, gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, kehumasan.
- b. **Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan** mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

**3. Bidang E-Government dan Teknologi Informasi,** mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas perbantuan di bidang Pengelolaan E Government, Statistik dan Persandian Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program infrastruktur teknologi dan persandian
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program aplikasi informatika dan statistik.
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program layanan e-government.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang E-Government dan Teknologi Informasi terdiri dari :

- a. **Seksi Infrastruktur Teknologi dan Persandian,** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas seksi Infrastruktur teknologi dan Persandian.
- b. **Seksi Aplikasi Informatika dan Statistik,** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas seksi Aplikasi Informasi dan Statistik.
- c. **Seksi Layanan e-Government,** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Layanan e-Government.

**4. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas perbantuan di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

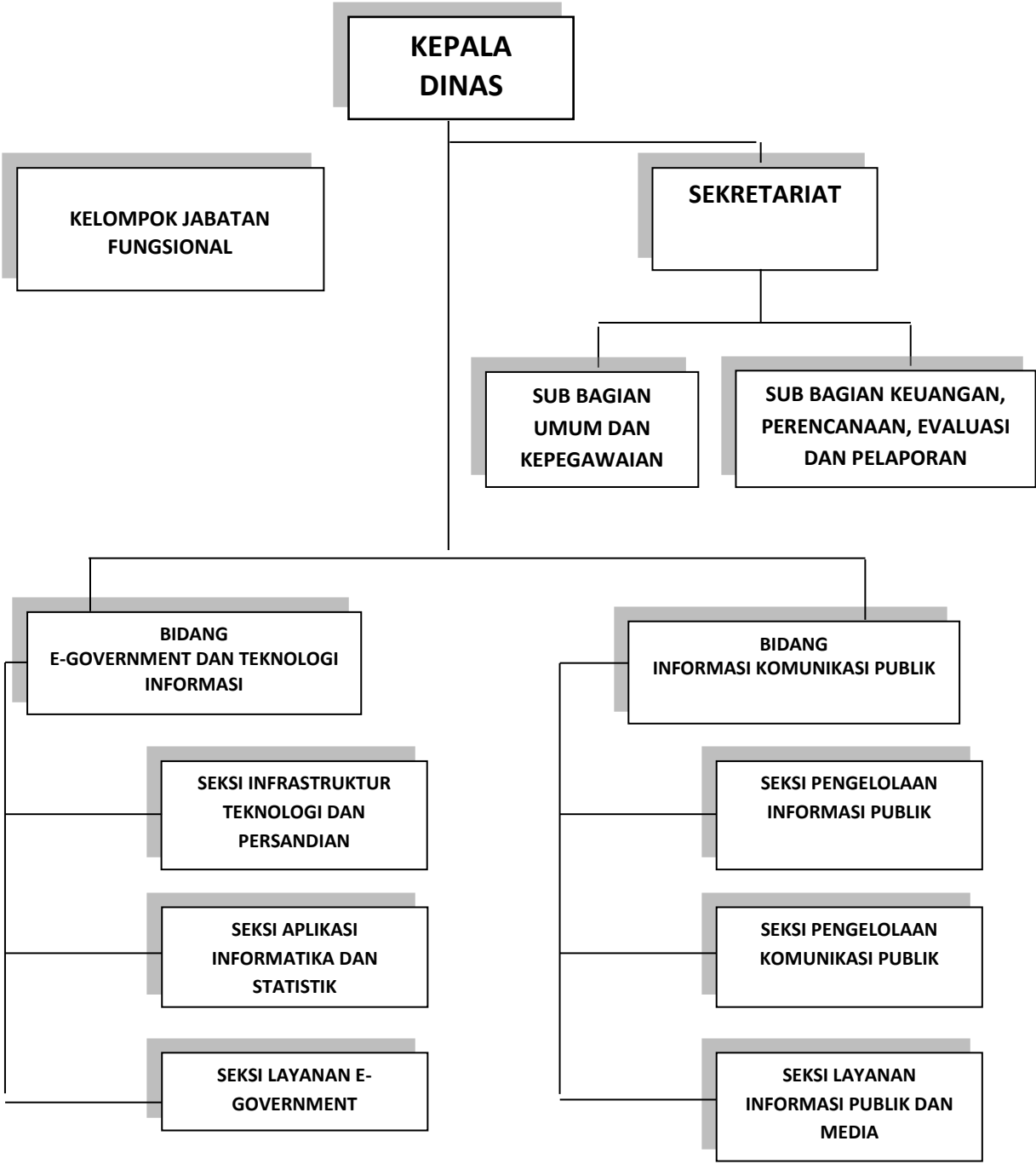
- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan informasi publik.
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan komunikasi publik.
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program layanan informasi publik dan media.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :

- a. **Seksi Pengelolaan Informasi Publik**, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di Lingkup Pemerintah Daerah.
- b. **Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengendalian komunikasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di daerah.
- c. **Seksi Layanan Informasi Publik dan Media**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik dan hubungan dengan media.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA PADANG PANJANG



C.2 Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yang merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui

Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika.

Secara kuantitatif jumlah pegawai sebagai personil (aparatur) yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sehari-harinya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang pada akhir tahun 2017, berjumlah sebanyak 39 (Tiga puluh sembilan) orang, yang terdistribusi pada Sekretariat dan Bidang. Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 21 orang atau 54 % berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan sebanyak 18 orang atau 46 % berstatus pegawai harian. Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan pegawai negeri sipil (PNS) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang menunjukkan sebanyak 19 (sembilan belas) orang atau 90 % berstatus pegawai negeri sipil yang telah menamatkan pendidikan kesarjanaaan (D.III hingga S2).

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa jumlah personil (ASN) pada Dinas Komunikasi dan Informatika masih sangat terbatas, terutama dibandingkan dengan kebutuhan bidang dan bagian untuk pekerjaan yang bersifat teknis dan administratif. Sumber daya manusia pegawai negeri sipil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang berdasarkan tingkat pendidikan formal dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

**Tabel 1**  
**Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH (ORANG) |
|----|--------------------|----------------|
| 1  | Strata 3           | -              |
| 2  | Strata 2           | 4              |
| 3  | Strata 1           | 8              |
| 4  | Diploma 3          | 5              |
| 5  | Diploma 2          | -              |
| 6  | Diploma 1          | -              |
| 7  | SLTA               | 4              |
| 8  | SLTP               | -              |
| 9  | SD                 | -              |
|    | J u m l a h        | 21             |

Sedangkan sumber daya manusia (SDM) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dilihat dari tingkat kepangkatannya dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini.

**Tabel 2**  
**Sumber Daya Manusia Aparatus Sipil Negara**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Berdasarkan Tingkat Kepangkatan**

| NO | PANGKAT/GOLONGAN               | JUMLAH (ORANG) |
|----|--------------------------------|----------------|
| 1  | Pembina Utama Muda / IV.c      | 1              |
| 2  | Pembina Tingkat I / IV.b       | 2              |
| 3  | Pembina / IV.a                 | 1              |
| 4  | Penata Tingkat I / III.d       | 2              |
| 5  | Penata / III.c                 | 5              |
| 6  | Penata Muda Tingkat I / III.b  | 3              |
| 7  | Penata Muda / III.a            | 2              |
| 8  | Pengatur Tingkat I / II.d      | 3              |
| 9  | Pengatur / II.c                | 1              |
| 10 | Pengatur Muda Tingkat I / II.b | 1              |
| 11 | Pengatur Muda / II.a           | -              |
| 12 | Juru Tingkat I / I.d           | -              |
| 13 | Juru / I.c                     | -              |
| 14 | Juru Muda Tingkat I / I.b      | -              |
| 15 | Juru Muda / I.a                | -              |
|    | J u m l a h                    | 21             |

**C.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya guna untuk menunjang kinerja pelayanan dilengkapi dengan beberapa sarana dan prasarana kerja yang tersedia, sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**Sarana dan Prasarana Kerja**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**

| NO | SERTIFIKASI BARANG | BANYAK<br>BARANG | KEADAAN |    |    | KET  |
|----|--------------------|------------------|---------|----|----|------|
|    | NAMA/JENIS BARANG  |                  | B       | RR | RB |      |
| 1. | Kendaraan Roda 4   | 3                | 2       | 1  | -  | Unit |
| 2. | Kendaraan Roda 2   | 1                | 1       | -  | -  | Unit |
| 3. | Lemari Arsip       | 2                | -       | 2  | -  | Unit |
| 4. | Mesin Absensi      | 1                | 1       | -  | -  | Unit |
| 5. | Komputer           | 5                | 3       | -  | 2  | Unit |
| 6. | Note Book          | 2                | -       | 2  | -  | Unit |

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah dan kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Kominfo masih sangat terbatas dan belum sepenuhnya dapat menunjang pelaksanaan tugas.

**D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKj IP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dengan sistematika penulisan yang mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, sebagai berikut :

Pengantar

Daftar Isi

Bab I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Penjelasan Umum Organisasi
- D. Sistematika Penyusunan LKj IP

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- A. Visi dan Misi
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Penetapan Kinerja Dinas, Kominfo Tahun 2017

Bab III : Akuntabilitas Kinerja 2017

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

Bab IV : Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Visi, dan Misi**

Memasuki periode pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 5 (lima) tahun kedua (2013 – 2018), Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai perangkat daerah Kota Padang Panjang merupakan salah satu SOPD (Satuan Organisasi Perangkat Daerah) yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian harapan terhadap terwujudnya **“KOTA PADANG PANJANG YANG AMANAH, AMAN DAN SEJAHTERA”**.Harapan tersebut merupakan puncak ukuran keberhasilan yang dicita-citakan dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang pada periode 2017 – 2018.

Seiring dengan harapan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi Pembangunan Kota Padang Panjang 2017 – 2018, melalui penetapan visi kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan (keadaan) yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang pada periode 2017 – 2018 selain dijiwai oleh harapan terwujudnya Kota Padang Panjang yang Amanah, Aman dan Sejahtera, tentunya dilandasi oleh isu strategis sebagai fokus pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dimasa mendatang. Isu strategis yang dihadapi terorientasi pada kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang serta upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas dalam bidang Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat.

Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang menetapkan visi 2017 – 2018 sebagai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu :

**“ Terselenggaranya Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Padang Panjang”**

Dalam rangka mewujudkan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2017 – 2018 maka perlu ditetapkan misi sebagai upaya-upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berkaitan dengan penetapan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang 2017 – 2018, maka perlu diperhatikan Misi Pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika 2017 –

2018 yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang. Untuk itu, dalam mengapresiasi upaya mendukung pelaksanaan misi pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2013 – 2018, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
3. Meningkatkan kualitas penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi di semua lembaga pemerintah daerah.

## **B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SOPD**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang berdasarkan rumusan misi sebagaimana tertuang diatas adalah sebagai berikut:

### **1. Misi Pertama :**

Meningkatkan kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur memiliki tujuan untuk meningkatkan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja kelembagaan.
- b. Meningkatkan prasarana dan sarana kerja yang memadai.
- c. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM aparatur.

### **2. Misi Kedua :**

Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta pos dan telekomunikasi.

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan Mekanisme dan Prosedur Standar Layanan Informasi Publik

- b. Menyediakan Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik
- c. Meningkatkan Kapasitas dan Kuantitas Layanan Informasi Publik
- d. Menyediakan Konten Layanan Informasi Publik

### **3. Misi Ketiga :**

Meningkatkan kualitas penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi di semua lembaga pemerintah daerah.

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur jaringan untuk layanan teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Meningkatkan kualitas sistem aplikasi yang terintegrasi di semua lembaga pemerintahan.
- c. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan bersama komunitas teknologi informasi dan komunikasi berbasis potensi lokal, regional dan nasional.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

### **C. Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017**

Penetapan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang pada tahun anggaran 2017 melalui kegiatan tahunan. Dalam penyusunan penetapan kinerja dijelaskan mengenai tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan, juga memberikan target (Quantitative Objectives) tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaannya. Dokumen penetapan kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, program, kegiatan dan rencana capaiannya.

Pada tahun anggaran 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang telah dapat menyusun penetapan kinerja sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

**PENETAPAN KINERJA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG  
TAHUN 2017**

| <b>No</b> | <b>SASARAN STRATEGIS</b>   | <b>INDIKATOR KINERJA</b>  | <b>TARGET</b>   | <b>PROGRAM</b>  | <b>KEGIATAN</b>  | <b>ANGGARAN</b>     |
|-----------|--|---|---|---|--|---------------------|
| <i>1</i>  | <i>2</i>   | <i>3</i>  | <i>4</i>  | <i>5</i>  | <i>6</i>   | <i>7</i>            |
| <b>1</b>  | <b>Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur dan Aplikasi Teknologi Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b> | Tersedianya sebaran informasi melalui Media Tradisional dan Kelompok Informasi Masyarakat                       | 4 (kelompok informasi masyarakat dan media tradisional) | <b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b> | 1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi.   | Rp. 121.785.000,-   |
|           |  | Terselenggaranya pengelolaan website Kota Padang Panjang  | 1 Tahun   |   | 2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi | Rp. 951.550.000,-   |
|           |  | Tersedianya dukungan media visual elektronik untuk informasi pembangunan daerah melalui media visual elektronik | 1 Paket Pengadaan Videotron                             |   | 3. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah                     | Rp. 2.125.725.000,- |

|   |  |  |                          |   |   |                   |
|---|--|--|--------------------------|---|---|-------------------|
|   |  | Tersedianya saluran penyebarluasan informasi terkait dengan isu aktual di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang                      | 100 release berita       |   | 4. Pemberdayaan jaringan komunikasi sosial        | Rp. 68.000.000,-  |
|   |  | Tersedianya saluran komunikasi interaktif Pemerintah Daerah dengan masyarakat  | 3 kali dialog interaktif |   | 5. Penayangan dialog interaktif                   | Rp. 152.200.000,- |
|   |  | Tersedianya informasi pembangunan daerah berupa konten/video media luar ruang sekaligus peningkatan PAD melalui komersialisasi videotron | 20 unir konten video     |   | 6. Optimalisasi Pemanfaatan Videotron             | Rp. 14.200.000,-  |
| 2 | <b>Terwujudnya Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b> | Jumlah aparatur/peserta yang mengikuti pelatihan<br><br>- Pelatihan SDM TI   | 70 orang peserta         | <b>Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b> | 7. Pelatihan SDM dalam bidang Teknologi Informasi | Rp. 75.950.000,-  |

|  |  |                               |                   |  |   |                  |
|--|--|-------------------------------|-------------------|--|---|------------------|
|  |  |                               |                   |  |   |                  |
|  |  | - Sosialisasi PPID            | 50 orang peserta  |  | 8. Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Pengelolaan Fungsi <span style="border: 1px solid black;">PPID</span> | Rp. 23.415.000,- |
|  |  | - Bimtek Jurnalistik Wartawan | 60 orang wartawan |  | 9. Bimbingan Teknis Jurnalistik bagi Wartawan   | Rp. 55.600.000,- |

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA 2017**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Laporan tersebut memberi gambaran mengenai tingkatan Pencapaian Kinerja, Sasaran serta Program/Kegiatan baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun tertentu.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (assessment) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Analisis pencapaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Sesuai dengan Penetapan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika ditetapkan 7 (tujuh) indikator kinerja untuk mendukung 2 (dua) sasaran strategis yang diuraikan sebagai berikut :

*Tabel 3.1*

| No | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET  | REALISASI   | CAPAIAN |
|----|--|---|---|---|---------|
| 1  | <b>Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur dan Aplikasi Teknologi Komunikasi, Informasi dan</b> | Tersedianya sebaran informasi melalui Media Tradisional dan Kelompok Informasi Masyarakat | 4 (kelompok informasi masyarakat dan media tradisional) | 4 (kelompok informasi masyarakat dan media tradisional) | 100%    |

|                    |   |  |                                      |      |
|--------------------|---|--|--------------------------------------|------|
| <b>Media Massa</b> |   |  |                                      |      |
|                    | Terselenggaranya pengelolaan website Kota Padang Panjang  | 1 Tahun  | 1 Tahun                              | 100% |
|                    | Tersedianya dukungan media visual elektronik untuk informasi pembangunan daerah melalui media visual elektronik                         | 1 Paket Pengadaan Videotron (8 unit)             | 1 Paket Pengadaan Videotron (8 unit) | 100% |
|                    | Tersedianya saluran penyebarluasan informasi terkait dengan isu aktual di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang                     | 100 release berita                               | 146 release berita                   | 146% |
|                    | Tersedianya saluran komunikasi interaktif Pemerintah Daerah dengan masyarakat   | 3 kali dialog interaktif                         | 3 kali dialog interaktif             | 100% |
|                    | Tersedianya informasi pembangunan daerah berupakonten/video media luar ruang sekaligus peningkatan PAD melalui komersialisasi videotron | 20 konten  | 30 konten                            | 150% |
| <b>2</b>           | <b>Terwujudnya Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>  | Jumlah aparatur/peserta yang mengikuti pelatihan |                                      |      |
|                    | - Pelatihan SDM TI  | 70 orang peserta                                 | 70 orang peserta                     | 100% |
|                    | - Bimtek Jurnalistik Wartawan   | 60 orang wartawan                                | 60 orang wartawan                    | 100% |
|                    | - Sosialisasi PPID  | 50 orang peserta                                 | 50 orang peserta                     | 100% |

Dari 7 indikator kinerja tersebut, seluruh indikator kinerja berhasil mendapatkan hasil yang baik. Penjelasan pencapaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja dapat dilihat di bawah ini :

**Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur dan Aplikasi Teknologi Komunikasi, Informasi dan Media Massa**

Untuk mendukung pencapaian sasaran Pengembangan Infrastruktur dan Aplikasi Teknologi Komunikasi, Informasi dan Media Massa dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan 5 (lima) kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2017 sebesar Rp.3.433.460.000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.221.023.808,- atau 80.06 %.

**Tabel 3.2**  
**Pengukuran Kinerja**  
**Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur dan Aplikasi Teknologi Komunikasi, Informasi dan Media Massa**

| No | SASARAN STRATEGIS  | No | INDIKATOR KINERJA   | TARGET  | REALISASI   | %   |
|----|--|----|---|---|---|-----|
| 1  | <b>Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur dan Aplikasi Teknologi Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b> | 1. | Tersedianya sebaran informasi melalui Media Tradisional dan Kelompok Informasi Masyarakat                           | 4 (kelompok informasi masyarakat dan media tradisional) | 4 (kelompok informasi masyarakat dan media tradisional) | 100 |
|    |  | 2. | Terselenggaranya pengelolaan website Kota Padang Panjang  | 1 Tahun   | 1 Tahun   | 100 |
|    |  | 3. | Tersedianya dukungan media visual elektronik untuk informasi pembangunan daerah melalui media visual elektronik     | 1 Paket Pengadaan Videotron                             | 1 Paket Pengadaan Videotron                             | 100 |
|    |  | 4. | Tersedianya saluran penyebarluasan informasi terkait dengan isu aktual di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang | 100 release berita                                      | 146 release berita                                      | 146 |
|    |  | 5. | Tersedianya saluran komunikasi interaktif Pemerintah Daerah dengan masyarakat                                       | 3 kali dialog interaktif                                | 3 kali dialog interaktif                                | 100 |

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja untuk 5 (lima) indikator kinerja ini sangat tinggi sebesar 109,2%. Dari indikator penyebaran informasi masyarakat terkait dengan isu aktual di Pemerintah Kota Padang Panjang melalui media sosial dengan target 100 release berita dapat terealisasi sebanyak 146 berita atau dengan capaian 146 %. Sementara untuk indikator lainnya tercapai sebesar 100%.

Perbandingan realisasi capaian kinerja sasaran strategis Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur dan Aplikasi Teknologi Komunikasi, Informasi dan Media Massa dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja**  
**Sasaran Srtegis 1 : Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur dan Aplikasi**  
**Teknologi Komunikasi, Informasi dan Media Massa**

| No | Indikator Kinerja   | Realisasi Indikator |          |
|----|---|---------------------|----------|
|    |   | 2016 (%)            | 2017 (%) |
| 1  | Tersedianya sebaran informasi melalui Media Tradisional dan Kelompok Informasi Masyarakat                       | 0                   | 100      |
| 2  | Terselenggaranya pengelolaan website Kota Padang Panjang  | 100                 | 100      |
| 3. | Tersedianya dukungan media visual elektronik untuk informasi pembangunan daerah melalui media visual elektronik | 100                 | 100      |
| 4. | Tersedianya saluran penyebaran informasi terkait dengan isu aktual di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang | 0                   | 146      |
| 5. | Tersedianya saluran komunikasi interaktif Pemerintah Daerah dengan masyarakat                                   | 0                   | 100      |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hanya 2 indikator yang dapat diukur, hal ini terkait dengan ketersediaan data di tahun sebelumnya dan adanya perubahan SOTK yang mengakibatkan terjadinya perubahan indikator kinerja antara Renstra Dishubkominfo dan Dinas kominfo sebagai OPD baru. Dari indicator yang dapat diukur, terlihat bahwa capaian kinerja juga baik dan stabil (tidak ada penurunan ataupun peningkatan).

**Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi**

Untuk mendukung pencapaian sasaran Terwujudnya Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2017 sebesar Rp.154.965.000,- dengan realisasi sebesar Rp.104.972.450,- atau 68,89 %.

**Tabel 3.4**  
**Pengukuran Kinerja**  
**Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi**

| No | SASARAN STRATEGIS   | No | INDIKATOR KINERJA                                | TARGET            | REALISASI         | %   |
|----|---|----|--|-------------------|-------------------|-----|
| 1  | Terwujudnya Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi | 1. | Jumlah aparatur/peserta yang mengikuti pelatihan |                   |                   |     |
|    |   | -  | Pelatihan SDM TI                                 | 70 orang peserta  | 70 orang peserta  | 100 |
|    |   | -  | Bimtek Jurnalistik Wartawan                      | 60 orang wartawan | 60 orang wartawan | 100 |

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja untuk indikator kinerja ini sangat tinggi sebesar 100%. Hal ini disebabkan tingginya tingkat kehadiran peserta untuk mengikuti bintek dan sosialisasi yang diadakan.

Perbandingan realisasi capaian kinerja sasaran strategis Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur dan Aplikasi Teknologi Komunikasi, Informasi dan Media Massa dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja**  
**Sasaran Srategis 1 : Terwujudnya Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi**

| No | Indikator Kinerja                                | Realisasi Indikator |          |
|----|--|---------------------|----------|
|    |  | 2016 (%)            | 2017 (%) |
| 1  | Jumlah aparatur/peserta yang mengikuti pelatihan |                     | 100      |
| 2  | - Pelatihan SDM TI                               | 0                   | 100      |
| 3. | - Bimtek Jurnalistik Wartawan                    | 0                   | 100      |

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa indikator ini tidak dapat diukur disebabkan merupakan indicator baru yang tersedia dalam Renstra Peubahan Dinas Kominfo di Tahun 2017.

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Sasaran RPJMD</b> | Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana perkotaan |
|----------------------|--|

Berdasarkan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018, urusan bidang Kominfo berperan dalam pencapaian misi ke 5 (lima) yakni **MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR KOTA, dengan sasaran** Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana perkotaan. Untuk itu dirumuskan indicator kinerja dalam pencapaian sasaran tersebut yaitu meningkatnya ketersediaan infrastruktur dan aplikasi tekhnologi informasi dan komunikasi.

**Tabel 3.6**  
**Pengukuran Kinerja**

| No | Sasaran  | Indikator Sasaran   | Target 2017 |         | Realisasi |
|----|--|---|-------------|---------|-----------|
|    |  |   | Sebelum     | Sesudah |           |
| 1. | Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana perkotaan | Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi | 62 %        | 100%    | 161,3%    |

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi kinerja untuk indikator ketersediaan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi sudah mencapai target. Dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 62 % pada tahun anggaran 2017, Dinas Komunikasi dan Informatika mampu memperoleh capaian realisasi sebesar 100 % atau

meningkat sebesar 161,3 % dengan kriteria sangat tinggi. Bila dilihat kaitannya dengan target akhir RPJMD pada tahun 2018 maka capaian realisasi ini sudah mencapai 142, 9%.

Indikator ini menggambarkan ketersediaan jaringan internet di Kota Padang Panjang yang mencakup 24 OPD, 16 Kelurahan dan 43 sekolah. Keberhasilan capaian ini didukung oleh adanya komitmen Pemerintah Daerah terutama dalam hal kebijakan dan penganggaran untuk merealisasikan ketersediaan jaringan internet/bandwith sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama untuk perkantoran, sekolah dan beberapa lokasi strategis wifi id gratis sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Pencapaian indikator ini juga di dukung oleh pelaksanaan program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi. Pada kegiatan ini terealisasi target kinerja berupa pengelolaan bandwith di 44 titik fiber optik (24 OPD, 16 Kelurahan dan 4 Puskesmas) dan 10 titik wifi gratis.

**B. Realisasi Anggaran Tahun 2017**

Realisasi pencapaian anggaran kinerja keuangan tahun 2017 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran tingkat pencapaian kinerja keuangan didasarkan data hasil pengukuran kinerja keuangan. Keberhasilan capaian indikator kinerja keuangan diatas tidak terlepas dari dukungan dana. Alokasi anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang pada tahun 2017 yang dialokasikan sebesar Rp. 6.176.501.000,- dari jumlah tersebut telah dapat direalisasikan sebesar 5.596.165.792,- atau 90,6%.

Rincian anggaran dan realisasinya adalah sebagai berikut :

**Realisasi Anggaran Pada Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Padang Panjang Tahun 2017**

| No          | Uraian                                      | Anggaran (Rp.)  | Realisasi (Rp.) | Sisa (Rp.)    | %     |
|-------------|---|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| 1           | Belanja Tidak Langsung<br>- Belanja Pegawai | 1.695.200.000,- | 1.505.610.975,- | 189.589.025,- | 88,82 |
| 2           | Belanja Langsung<br>- Belanja barang & jasa | 2,268,126,000   | 1,946,857,213   | 321.268.787,- | 85.84 |
|             | - Belanja modal                             | 2,213,175,000   | 2,143,697,604   | 69.477.396,-  | 96.86 |
| J u m l a h |   | 6.176.501.000,- | 5.596.165.792,- | 580.335.208   | 90,6  |

Realisasi anggaran sebesar Rp. 5.596.165.792,-atau 90,6 % dibawah anggaran yang disediakan mencerminkan adanya upaya efesiensi penggunaan anggaran pada beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang pada tahun anggaran 2017.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2017 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban tertulis atas asas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) dan sekaligus memberikan gambaran dan evaluasi kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang selama Tahun Anggaran 2017.

Berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis, diperoleh gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yang sangat memuaskan dengan tingkat capaian rata rata 100%. Salah satu faktor pendukung keberhasilan ini adalah cukup tingginya komitmen dan perhatian pemerintah daerah dalam hal kebijakan dan penganggaran untuk merealisasikan ketersediaan jaringan dan infrastruktur teknologi informasi sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

#### **B. Saran**

Beranjak dari kondisi yang sudah dijabarkan di atas, ada beberapa rencana tindak lanjut yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan kinerja di tahun yang akan datang, diantaranya ;

1. Memastikan adanya sinkronisasi/kesesuaian program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan yang telah ada (RPJMD dan Renstra), dan sehingga capaian kinerja/program dapat lebih terukur.
2. Memperbaiki sistem dan pengelolaan manajemen kinerja sehingga capaian kinerja yang telah ada dapat terus ditingkatkan.

Selanjutnya, diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Dinas Komunikasi dan Informatika ini dapat memberi umpan balik guna peningkatan efisiensi serta efektifitas pelaksanaan urusan bidang komunikasi dan informatika sekalligus sebagai bahan dan pedoman untuk mengevaluasi dalam melaksanakan kegiatan pada tahun anggaran selanjutnya.

Padang Panjang, Januari 2018

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Padang Panjang**

  
**MARWILIS, SH, MSI**  
**NIP. 19610703 198203 1 008**